

PEMERINTAH PUSAT HAPUS CUTI BERSAMA

Sultan: Penegakan Prokes Jadi Kunci

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat memastikan untuk menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru). Bahkan sejumlah strategi sudah disiapkan untuk melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan memperketat penegakan protokol kesehatan (Prokes).

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang dikhawatirkan bisa terjadi usai libur Nataru. Karena jika libur tidak dipangkas, akan ada lebih banyak warga yang melakukan mobilitas untuk keperluan mudik maupun berwisata. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemda DIY meminta agar masyarakat yang didalamnya termasuk para wisatawan selalu menegakkan Prokes.

"Saya kira yang terpenting Prokes harus tetap dijaga, karena hal itu tetap menjadi kunci. Kita tidak bisa membatasi siapa yang mau datang dan jumlah berapa. Untuk itu saya berharap meski saat ini beberapa destinasi wisata mulai dibuka dan ada pelonggaran, saya berharap tidak sampai ada klaster. Dengan begitu saat menghadapi Natal dan Tahun Baru bisa lebih mudah diprediksikan," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Keparatihan, Rabu



Sri Sultan HB X
(27/10).

Sultan mengatakan, penegakan Prokes sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang Nataru, tapi sejak sekarang, supaya kemungkinan muncul klaster baru bisa dicegah.

Untuk itu, Pemda DIY akan terus memantau perkembangan kasus Covid-19 menjelang libur Nataru.

Apabila trend penambahan kasus menunjukkan adanya peningkatan, Pemda DIY akan memikirkan cara menekan mobilitas masyarakat supaya tidak terjadi lonjakan kasus. Salah satu caranya dengan meminta masyarakat untuk patuh dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah atau berwisata ke DIY.

"Kalau sekarang tidak terjadi klaster nanti di tahun baru mungkin kondisinya akan lebih baik. Kalau ada klaster mungkin kita akan memperketat di tahun baru. Kira-kira nanti realitas seperti itu. Harapan kita ya semoga tidak ada klaster baru sehingga melandai saja saat memasuki Natal dan tahun baru," ungkapnya.

(Ria)-f

REALISASI PROGRAM 'KITA JAGA USAHA'

Baznas Bantu Sembako 1.800 PKL Malioboro

YOGYA (KR) - Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) membagikan 1.800 paket sembako kepada pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di ruang rapat Kanwil Kemenag DIY Jalan Sukonandi 8, Rabu (27/10).

Ketua Baznas DIY, Dra Hj Puji Astuti MSI, menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan realisasi program Kita Jaga Usaha yang diluncurkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad di Bangsal Keparatihan, beberapa waktu lalu. Saat itu dilakukan launching pemberian bantuan modal usaha dan paket sembako.

"Hari ini pembagian paket sembako sudah kita real-



KR-Frans Budisukamanto

Penyerahan paket sembako kepada salah satu penerima.

isasikan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban hidup para PKL yang menerima," katanya.

Puji Astuti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berpartisipasi mendukung program ini. Keempat BUMN terdiri BNI, PNM, Askrindo dan Jamkrindo.

Sedang Hendra Jazius dari Perwakilan PNM Cabang Yogyakarta menjelaskan, dukungannya terhadap program Baznas Kita Jaga Usaha merupakan wujud kepeduliannya terhadap perkembangan kegiatan usaha. Sebab mereka termasuk yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Karena itu sudah semestinya kalau membantu mereka. (Fie)-f

MANFAATKAN LAHAN KOSONG UNTUK PERTANIAN

Karang Taruna Gowongan Hijaukan Kampung

YOGYA (KR) - Kaum muda di wilayah Kelurahan Gowongan berhasil menyulap lahan kosong menjadi produktif. Kampung di tengah perkotaan itu pun terlihat hijau seiring aneka tanaman anggur maupun sayur yang ditanam.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Gowongan Satria Budi Kurniawan, mengaku lahan yang dimanfaatkan nya tersebut merupakan Sultan Ground yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) di kawasan Panti Wilosoprojo. "Tujuan utama sebenarnya bagaimana ini bisa menjadi hijau. Kemudian nanti juga bisa berkembang untuk wisata petik anggur," ungkapnya, Rabu (27/10).

Berbagai jenis anggur berhasil ditanam di lahan tersebut. Ada belasan jenis antara lain jupiter, julian, harold, victor, super sonaka dan lain sebagainya. Tanaman anggur menjadi salah satu andalan bercocok tanam karena berawal dari tantangan. Menurut Satria, sebagian masyarakat menganggap jika anggur sulit ditanam padahal minat atau



KR-Istimewa

Heroe Poerwadi ikut memanen anggur hasil budidaya warga Gowongan.

pasar buah tersebut cukup terbuka lebar. "Ternyata memang mudah dibudidayakan. Kalau di Ukraina sana panen setahun sekali, tapi di sini karena iklim tropis dan mendukung maka bisa dikejar pemuahan secara terus menerus," urainya.

Budidaya tanaman anggur sudah dilakukan kaum muda Gowongan bersama masyarakat sejak lima bulan terakhir. Namun sebelumnya sudah diawali dengan beberapa usaha produktif di lahan kosong tersebut. Antara lain budidaya maggot hingga terkendala pakan kemudian unggas dan ikan hias. Biaya produk-

si melalui swadaya masyarakat pun tergolong tinggi hingga akhirnya mengembangkan tanaman anggur yang minim operasional. Oleh karena itu selain anggur, produktivitas lainnya juga masih dilakukan seperti ikan lele, bebek, itik dan aneka sayur.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, yang berkesempatan memanen anggur menilai, produktivitas kaum muda di Gowongan patut diapresiasi. Lahan yang belum dimanfaatkan oleh Dinsosnakertrans tersebut terbukti mampu memberikan nilai positif bagi kampung maupun masyarakat setempat.

"Ini bagian dari ikhtiar bahwa kaum muda memiliki semangat dalam bertani," tandasnya.

Oleh karena itu dirinya meminta Dinas Pertanian dan Pangan agar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian. Setidaknya mampu digunakan menanam aneka sayur yang dimakan setiap hari guna memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih lahan kosong yang dimanfaatkan Karang Taruna Gowongan ini tergolong cukup luas sehingga masih banyak sektor pertanian yang bisa dikembangkan.

Meski demikian, Heroe mengusulkan ada aspek spesifik yang menjadi andalan agar lebih mudah dalam mendapatkan pasar. Seperti halnya tanaman anggur yang dikembangkan tersebut bisa lebih ditekuni secara serius sehingga kelak menjadi jujugan wisatawan.

"Selain mengembangkan yang spesifik ke depan juga disinergikan dengan potensi yang ada di sini. Kalau saling terintegrasi hasilnya juga akan jauh lebih optimal," katanya.

(Dhi)-f

Museum Dituntut Kembangkan Ekonomi Kreatif

YOGYA (KR) - Museum sebagai pusat kebudayaan dan rumah peradaban bangsa, senantiasa harus dijaga kelestariannya. Para pengelola diharapkan mampu berpikir cerdas dan kreatif agar museum tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat penelitian, pendidikan dan kesenangan.

"Pengembangan program ekonomi kreatif akan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi museum juga masyarakat umum di sekitar museum," tegas Ketua Umum Badan Musyawarah Musea (Barahmus) DIY, Ki Bambang Widodo saat membuka Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk Museum, Rabu (27/10) di Hotel GAIA Cosmo Yogya.

Di depan sekitar 40-an peserta Utusan Museum Anggota/Calon Anggota Barahmus yang mengikuti workshop dengan prokes, Ki Bambang mengakui pandemi Covid-19 selama 1,5 tahun lebih ini banyak museum tutup, tidak mempunyai pemasukan dan kesulitan biaya operasional serta usaha pengembangan museum. "Workshop didukung Dinas Kebudayaan (Kun-



KR-Juvintarto

Foto bersama sesaat setelah pembukaan workshop yang digelar Barahmus DIY.

dha Kabudayaan) DIY dengan Dana Keistimewaan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan bekal cara menyusun proposal, mengimplementasikan dan mengembangkan program ekonomi kreatif di museumnya masing-masing," jelasnya.

Workshop sehari ini menghadirkan narasumber kompeten Dewan Penasehat Barahmus DIY Drs Budiharjo MM (Museum Sumber Inspirasi), Guru Besar UGM Teknik Arsitektur dan Perencanaan FT UGM Prof Dr Ir Wiendu Nuryanti MArch (Pengembangan Ekonomi Kreatif), Pengelola Museum Ullen Sentalu KRT Daniel Harwodiningrat MHum (Berba-

gai Inspirasi Ekonomi Kreatif untuk Menunjang Eksistensi dan Kegiatan Museum) di sesi pagi.

Dilanjutkan narasumber dari RC Studio Redy Kusnanto (Menciptakan Produk Cinderamata Museum) dan Pamong Budaya Ahli Madya V Agus Sulistya, SPd MA (Menyusun Model Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif).

"Workshop menjadi momentum bagi museum untuk bangkit mencari terobosan usaha dana sehingga dapat terus berkarya, mencerahkan, mencerdaskan, dan menghibur," ungkap GKR Bendara yang hadir sebagai Kepala Museum Kraton Yogyakarta.

(Vin)-f

DIBUTUHKAN PENYINTAS DISABILITAS PSIKOSOSIAL

Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat

YOGYA (KR) - Tingginya angka kasus kesehatan jiwa di DIY mendorong DPRD DIY berinisiatif melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang kesehatan jiwa. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) menjadi peluang untuk membangun kebijakan penanganan kesehatan jiwa yang tersistem sehingga bisa menjadi panduan dan landasan semua stakeholder yang bergerak di isu kesehatan jiwa.

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Perda Kesehatan Jiwa tersebut, sehingga nantinya dihasilkan Perda yang komprehensif dan menjawab kebutuhan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), maka Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY) bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan Jiwa (Ampuh) DIY melakukan audiensi 'Policy Brief Investasi Membangun Ekosistem Sehat Jiwa yang Komprehensif di DIY' ke DPRD DIY, Rabu (27/10) diterima oleh Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto.

Desty Endah N, penyintas disabilitas psikososial dalam audiensi tersebut menuturkan bahwa program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat belum menjadi regula-

si di pemerintah. Sementara dari pengalaman yang ia miliki sebagai orang dengan disabilitas psikososial yang sudah didampingi Yakkum sejak tahun 2017, Desty mampu bangkit dan berdaya dengan dukungan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat melalui terbentuknya kelompok swabantu di tingkat desa.

"Melalui audiensi ini, kami berharap temuan lapangan dan pembelajaran yang diperoleh dan dijabarkan dalam policy brief ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Raperda tentang kesehatan jiwa di DIY," terang Desty. Turut menyampaikan policy brief, Ranie AH dari Pusat Rehabilitasi Yakkum, Putri Endah W dari Bicara, Wahyu Widayat dari Imaji, Sri Hascaryo (penyintas dengan disabilitas psikososial) dan Yohannes Herdiyanto dari KPSI.

Pusat Rehabilitasi Yakkum melalui proyek kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang didukung oleh CBM, mendampingi orang dengan disabilitas psikososial di 3 kabupaten di DIY (Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul).

(Dev)-f



NOMENKLATUR RKB MASIH MENGAMBANG

Akses Pendidikan Pra Sejahtera Harus Terjamin

YOGYA (KR) - Wacana meleburkan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait kuota ke sekolah negeri perlu dipertimbangkan secara matang. Hal ini karena jumlah DTKS di Kota Yogya jauh lebih besar dibanding KMS. Sementara akses pendidikan bagi keluarga pra sejahtera harus terjamin.

Anggota DPRD Kota Yogya Ahmad Mufaris, mengungkapkan begitu menerima informasi rencana penghapusan kuota KMS untuk dialihkan DTKS dirinya langsung konfirmasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya.

"Harus dipertimbangkan betul dasar dan tujuannya. Jangan sampai justru nanti menimbulkan persoalan," ungkapnya.

Menurut anggota Komisi D ini, KMS merupakan data faktual yang diperbarui setiap tahun. Parameternya pun disesuaikan dengan kondisi di daerah. Berbeda dengan DTKS yang merujuk ketentuan Kementerian Sosial atau skala nasional. Apalagi ada beberapa pemegang KMS yang belum masuk dalam DTKS.

Oleh karena itu kebijakan afirmatif Pemkot Yogya untuk keluarga pra sejahtera dalam akses pendidikan harus dipertegas. Jika memang dituntut me-

Ahmad Mufaris



KR-Istimewa

nyesuaikan DTKS, tetap harus ada kebijakan lokal yang mengakomodir keluarga pra sejahtera yang belum masuk DTKS.

"Pendidikan itu kan hak setiap warga. Sehingga bagaimanapun juga perlu ada kebijakan afirmatif. Terutama kuota yang diberikan betul warga pra sejahtera betul-betul sesuai kondisi riil," tandasnya.

Di samping itu, politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti nomenklatur Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang masih mengambang. Idealnya RKB masuk dalam bidang pelestarian budaya namun hingga saat ini justru belum terakomodir. Akibatnya, kegiatan seni dan budaya yang diampu oleh kelompok masyarakat di wilayah rentan belum bisa dimaksimalkan.

"Kepala daerah seharusnya mengambil tindakan dalam hal tata organisasi. Apalagi semua kelurahan nantinya diarahkan menjadi RKB. Tapi jangan sampai nomenklaturnya seakan digantung," katanya.

Dari 45 kelurahan di Kota Yogya, baru dua kelurahan yang sudah ditetapkan DIY sebagai kelurahan budaya yakni Terban dan Kricak. Kemudian terdapat 22 kelurahan yang masuk akreditasi RKB. Sedangkan sisanya yakni 21 kelurahan masih butuh pembinaan.

(Dhi)-f

 UNIVERSITAS GADJAH MADA Bulaksumur Yogyakarta 55281, Telp. +62 (274) 562011, Fax. +62 (274) 565223 E-mail: setr@ugm.ac.id

Turut Berduka Cita
Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Gadjah Mada menyatakan berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

Prof. Dr. Ir. Sri Warnijati Agra
(Guru Besar Purnatugas Fakultas Teknik UGM)
Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 02 Juni 1933

Meninggal dunia pada Minggu, 24 Oktober 2021 di Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Sebelum acara kremasi, jenazah disemayamkan di Balairung UGM Kamis, 28 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021
Rektor
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng.